

DPR Dorong Negara Anggota ASEAN Terapkan Lima Kesepakatan Masalah Krisis Myanmar



Realitarakyat.com – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani di Jakarta, Minggu, menyambut baik lima poin kesepakatan yang disetujui bersama oleh para kepala negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada pertemuan ASEAN Leaders' Meeting.

“Kami mengapresiasi terselenggara-nya pertemuan ini dan meyakini lima konsensus (kesepakatan, Red) yang disepakati ‘ASEAN Leaders’ Meeting’ bisa memberi harapan baru bagi penyelesaian masalah Myanmar,” kata Christina melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Ia mendorong negara-negara anggota ASEAN segera menerapkan lima kesepakatan tersebut sehingga krisis politik di Myanmar dapat segera berakhir.

“Kami juga mendukung agar konsensus yang diambil tersebut bisa segera diimplementasikan sehingga krisis politik di Myanmar dapat segera terselesaikan,” ujar Christina menegaskan.

Enam kepala negara, yaitu dari Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, serta para menteri luar negeri dari Laos, Thailand, dan Filipina, hadir pada ASEAN Leaders' Meeting di Jakarta, Sabtu. Dalam pertemuan itu, para pimpinan dan perwakilan negara-negara anggota ASEAN membahas krisis politik di Myanmar bersama pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Dari pertemuan itu, para pemimpin menyepakati lima poin konsensus, yang di antaranya meminta para pihak menahan diri dan menghentikan kekerasan; memulai dialog konstruktif demi menemukan solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar; utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal ASEAN; ASEAN akan memberi pendampingan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Manajemen Bencana ASEAN (AHA Centre); dan utusan khusus ASEAN beserta delegasinya akan mengunjungi Myanmar untuk menemui para pihak.

Menurut pernyataan perdana menteri Singapura dan perdana menteri Malaysia, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menanggapi dengan baik konsensus tersebut dan tidak menentang peran konstruktif ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di negaranya.

Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan kepentingan rakyat Myanmar harus selalu jadi prioritas, sehingga kekerasan harus segera dihentikan demi memulihkan kembali demokrasi dan stabilitas di Myanmar.

Myanmar jatuh dalam krisis politik setelah junta militer meng kudeta pemerintahan yang terpilih secara demokratis, kemudian menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi dan HAM di Myanmar.

Ribuan massa di berbagai daerah Myanmar pun unjuk rasa dan aksi pembangkangan sipil menolak kudeta militer tersebut.

Aksi masyarakat sipil itu, pada sejumlah kasus, ditanggapi dengan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan di Myanmar sehingga ratusan orang tewas.

Data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP) menunjukkan korban tewas akibat unjuk rasa anti kudeta di Myanmar sudah mencapai lebih dari 600 orang.[prs]